

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Braithwaite, John, 2022, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, Thomson Reuters, United States of America.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HS, Salim, *et al.*, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mochtar, Zaenal Arifin, *et al.*, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Penerbit, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, *et al.*, 2010, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Paripurna, Amira, dkk, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, *et al.*, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok.
- Sumardjono, Maria SW., 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suteki, *et al.*, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Syaufi, Ahmad, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Publishing and Library Section, United Nations Office, Vienna.
- Utarini, Adi, 2020, *Penelitian Kualitatif Dalam Pelayanan Kesehatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Kurniawan Tri, *et al.*, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Yusuf, Anas, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 87).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 916).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Nega Publik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986).

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

### C. Jurnal, Tesis, Disertasi, Makalah

Abdullah, Suparman Abdullah, Sultan, *et.al.*, “Makna kearifan lokal To Parenge dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 13 No. 2, 2018.

Ainal, Mardiah, Din, Mohd., *et.al.*, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2012.

Angkasa, Yulia, Rena, *et.al.*, “Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, Maret 2021.

Aries, Muh. Fauzan, 2020, “Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Astari, Prima, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8 Nomor 1 April 2015.

Aulia, M. Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2018.

Azizah, Ainul, Suarda, I Gede Widhianan, *et.al.*, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.2 Juni 2023.

- Fauza, Rosyda, 2022, “Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Kusmayanti, Hazar, Kania, Dede, *et.al.*, “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 6 Nomor 2, April 2022.
- Murdiyambroto, Debi Triyani, dan Fahmanadie, Daddy, “Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia”, *Jurnal Banua Law Review*, Volume 3 Issue 2, October 2021.
- Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Volume 3 Nomor 2 Mei-Agustus 2014.
- Ningtias, Dwi Rachma, Sampara, Said Sampara, *et.al.*, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 5, Oktober 2020.
- Nipur, Milele, Ramampuk, Selvie, *et.al.*, “Tradisi Ritual Bakar Batu Pada Masyarakat Suku Dani Di Distrik Kalome Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua”, *Jurnal Holistik*, Vol 15 No. 2 April-Juni 2022.
- Nugraha, Gamal Prasetya, 2018, “Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Perdana, Dedy Ilham, Tulis, Riamona Sadelman, *et.al.*, “Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol 3 No 2 Bulan Juli 2019.
- Pradipta, Aulia, 2021, “Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putra, I Ketut Cahyadi, “Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan *Welfare State* Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 1 Mei 2017.
- Rahma, Ida, Penerapan Teori Dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal At-Tasyri*, Volume XI Nomor 2, Juli - Desember 2018.

- Rocaheti, Nur, Sutanti, Rahmi Dwi, Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3, Juli 2018, hlm. 198-214.
- Satria, Hariman, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1 / Juni 2018.
- Siregar, Sari Mariska, 2020, “Kajian Penerapan Diversi Berbasis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sundari, RR. Herni Sri, *et.al.*, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Jurnal Dekrit*, Volume 9 Nomor 2 2019.
- Susanto, Edi, 2021, “Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan Restoratif”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Soedirman, Purwokerto.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok”, *Jurnal Mabasana*, Volume 1 Januari-Juni 2018.

#### D. Internet

- Alfi Dimiyati, Sanksi Susu Kental Manis Kenapa ‘Masih Manis’, <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/190074/sanksi-susu-kental-manis-kenapa-masih-manis>, diunggah tanggal 17 November 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/konferensi>.
- Dian Erika Nugraheny, “BPOM Akan Pidanakan 2 Perusahaan Farmasi Terkait Penggunaan EG dan DEG Konsentrasi Tinggi”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/16461961/bpom-akan-pidanakan-2-perusahaan-farmasi-terkait-penggunaan-eg-dan-edg>, diunggah tanggal 24 Oktober 2022.
- Hidayat, Aziz Alimul, *et.al.*, 2015, *Buku Ajar Kebuthan Dasar Manusia*, Health Book Publishing, Surabaya, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Hb8TEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=kebutuhan+dasar+manusia&ots=msJcxJcdt5&sig=PTZMIWHcuEjffr50\\_xwpNXDI\\_ks&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kebutuhan%20dasar%20manusia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Hb8TEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=kebutuhan+dasar+manusia&ots=msJcxJcdt5&sig=PTZMIWHcuEjffr50_xwpNXDI_ks&redir_esc=y#v=onepage&q=kebutuhan%20dasar%20manusia&f=false), hlm. 10.
- Humas Badan Pom, Bahaya Bahan Kimia Obat (Bko) Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu), <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/BAHAYA-BAHAN-KIMIA-OBAT%20BKO%20YANG-DIBUBUHKAN->

*KEDALAM-OBAT-TRADISIONAL%20JAMU-.html*, diunggah  
tanggal 16 September 2006.

Humas Badan POM, Kepala Badan POM: Tindak Pidana Obat dan  
Makanan Merupakan Perkara Penting!,  
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/358/Kepala-Badan-POM--Tindak-Pidana-Obat-dan-Makanan-Merupakan-Perkara-Penting-.html>, diunggah tanggal 14 Maret 2017

Joni Ihsan, "Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Tugas Pembimbing  
Kemasyarakatan (Pk) Dalam Implementasi Keadilan Restoratif",  
<https://www.kompasiana.com/joni45409/5fecaf58d541df6ac8390463/landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-tugas-pembimbing-kemasyarakatan-pk-dalam-implementasi-keadilan-restoratif?page=all#section1>, diunggah tanggal 30 Desember 2020.

Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, Sistem Informasi Penelusuran  
Perkara a/n Slamet Winarno, [http://sipp.pn-mungkid.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-mungkid.go.id/index.php/detil_perkara).

Pusat Informasi Obat dan Makanan, "Dasar Hukum Penyidikan Obat Dan  
Makanan",  
<https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasarhukum&halaman=1>.

Rindi Salsabila, "Obat Sirup Berbahaya:324 Anak Meninggal, BPOM  
Digugat", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226174054-33-400254/obat-sirup-berbahaya-324-anak-meninggal-bpom-digugat>, diunggah tanggal 26 Desember 2022.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), *Basic Principles on  
the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*  
<https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>.

Vanya Karunia Mulia Putri, Contoh Mengakui Sikap Persamaan Derajat Antar  
Manusia,  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/08/131500869/contoh-sikap-mengakui-persamaan-derajat-antarmanusia#:~:text=Dikutip%20dari%20situs%20Badan%20Pembinaan,%2C%20warna%20kulit%2C%20dan%20lainnya.>, diunggah  
tanggal 8 Oktober 2021

Vanya Karunia Mulia Putri, Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila,  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/10/132627669/contoh-penerapan-sila-keempat-pancasila>, diunggah tanggal 2 Desember  
2021.

Widyawati, Susu Kental Manis Bukan Untuk Dikonsumsi Setiap Hari,  
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20180705/1926416/susu-kental-manis-bukan-dikonsumsi-setiap-hari/>, diunggah tanggal 6  
Juli 2018.

## E. Laporan

Deputi Bidang Penindakan Badan POM, 2020, *Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan POM Tahun 2020-2024*, Badan POM, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2022, *Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan POM Tahun 2021*, Badan POM, Jakarta.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, 2022, *Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan Badan POM Tahun 2021*, Badan POM, Jakarta

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, *Laporan Penelitian Pola Penyelesaian Sengkete Adat di Bali*, Universitas Udayana, Denpasar

## F. Pidato

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, “Konsep, Strategi, Dan Peran UPT Dalam Pelaksanaan Penyidikan”, *Pidato*, Rapat Koordinasi Regional Penindakan Obat dan Makanan, Denpasar, 16 November 2021